

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Sejahtera*, adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
- b. *Berdikari*, merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.
- c. Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama "***Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***". Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 disusun pada periode transisi akhir RPJMD Tahun 2013 – 2018 ke RPJMD Tahun 2018 – 2023. Pelaksanaan Pembangunan Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target RPJMD Tahun 2018 – 2023. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan **prioritas pembangunan daerah tahun 2019**, meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah;
3. Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi;
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
5. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
6. Pengurangan kesenjangan wilayah;
7. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

C. DATA UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografi dan Demografi

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, secara geografis terletak di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04 % dari luas Pulau Jawa. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Laut Jawa di sebelah Utara; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur dan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Tabel 1.1.
Penduduk Jateng Menurut Kab/Kota serta Luas Wilayah
Tahun 2018 – 2019

No.	Kab/Kota	2018	2019	Luas
1	Kab. Cilacap	1,719,504	1,727,098	2124.47
2	Kab. Banyumas	1,679,124	1,693,006	1335.3
3	Kab. Purbalingga	925,193	933,989	677.55
4	Kab. Banjarnegara	918,219	923,192	1023.73
5	Kab. Kebumen	1,195,092	1,197,982	1211.74
6	Kab. Purworejo	716,477	718,316	1091.49
7	Kab. Wonosobo	787,384	790,504	981.41
8	Kab. Magelang	1,279,625	1,290,591	1102.93
9	Kab. Boyolali	979,799	984,807	1008.45
10	Kab. Klaten	1,171,411	1,174,986	658.22
11	Kab. Sukoharjo	885,205	891,912	489.12
12	Kab. Wonogiri	957,106	959,492	1793.67
13	Kab. Karanganyar	879,078	886,519	775.44
14	Kab. Sragen	887,889	890,518	941.54
15	Kab. Grobogan	1,371,610	1,377,788	2013.86
16	Kab. Blora	862,110	865,013	1804.59
17	Kab. Rembang	633,584	638,188	887.13
18	Kab. Pati	1,253,299	1,259,590	1489.19
19	Kab. Kudus	861,430	871,311	425.15
20	Kab. Jepara	1,240,600	1,257,912	1059.25
21	Kab. Demak	1,151,796	1,162,805	900.12
22	Kab. Semarang	1,040,629	1,053,786	950.21
23	Kab. Temanggung	765,594	772,018	837.71
24	Kab. Kendal	964,106	971,086	1118.13
25	Kab. Batang	762,377	768,583	788.65
26	Kab. Pekalongan	891,892	897,711	837
27	Kab. Pemasaran	1,299,724	1,302,813	1118.03
28	Kab. Legal	1,437,225	1,440,698	876.1
29	Kab. Brebes	1,802,829	1,809,096	1902.37
30	Kota Magelang	121,872	122,111	16.06
31	Kota Surakarta	517,887	519,587	46.01
32	Kota Salatiga	191,571	194,084	57.36
33	Kota Semarang	1,786,114	1,814,110	373.78
34	Kota Pekalongan	304,477	307,097	45.25
35	Kota Tegal	249,003	249,905	39.68

Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

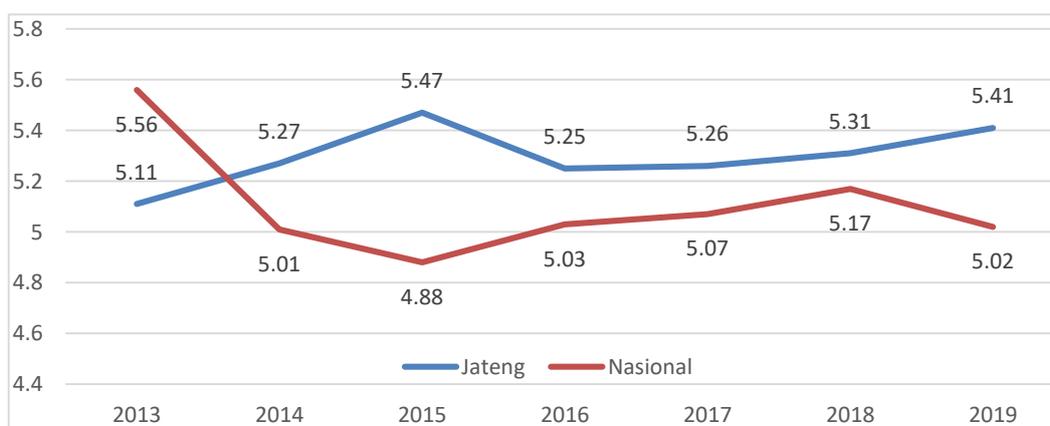
Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebanyak 23.516.110 jiwa berada pada usia produktif (15-64 tahun), lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 11.202.094 jiwa. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 47,64 persen, yang artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 48 penduduk tidak produktif.

Penduduk Provinsi Jawa Tengah bekerja pada berbagai lapangan usaha. Adapun perinciannya secara umum adalah sebagai berikut: 1). sebanyak 4,09 juta jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah yang berusia 15 tahun ke atas (23,48%) bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan; 2). sebanyak 3,89 juta jiwa (22,32%) bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan; dan 3). sebanyak 3,31 juta jiwa (18,98%) bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Apabila dibandingkan dengan jumlah pekerja tahun 2018, maka jumlah pekerja di lapangan usaha pertanian mengalami penurunan sebanyak 2,61 persen dimana pada tahun 2018 sebesar 4,20 juta jiwa (24,38%). Sementara untuk jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran masing-masing mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, dimana pada 2018 jumlah pekerja lapangan usaha industri pengolahan 3,76 juta jiwa (21,78%) dan pekerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran 3,22 juta jiwa (18,69%).

2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 5,41 persen lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2018-2019, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 juga lebih tinggi dibanding nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Bahkan sejak tahun 2014 hingga 2019, seperti tampak dalam Grafik 1.1, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu lebih tinggi dibanding nasional.



Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Grafik 1.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2019

Dari sisi Penawaran Ekonomi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11,62 persen, diikuti lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 10,54 persen dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,14 persen.

Tingginya pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi disebabkan karena penggunaan data internet untuk media sosial, transaksi online, dan sebagainya konsisten meningkat. Perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam kegiatan usaha. Tidak hanya pelaku usaha, pemanfaatan teknologi oleh instansi pemerintah juga meningkat, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah semakin gencar dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti melalui pengembangan aplikasi mobile berbasis android. Sementara pertumbuhan pada penyediaan akomodasi dan makan minum karena terjadi peningkatan aktivitas perorangan ataupun lembaga yang dilakukan di hotel sehingga meningkatkan *occupancy rate* hotel, termasuk karena faktor peningkatan pariwisata.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah mengalami penguatan dari 4,35 persen menjadi 5,19 persen. Sementara lapangan usaha pertanian mengalami perlambatan dari 2,63 persen di tahun 2018 menjadi 1,36 persen. Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 2019 mengakibatkan tanaman pertanian tidak tumbuh dengan baik sehingga produksinya menurun akibat puso. Data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurut lapangan usaha Tahun 2018 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan Lapangan Usaha yang berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2018 – 2019

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN (%)	
		2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,62	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,45	3,36
3	Industri Pengolahan	4,35	5,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	5,48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,88	4,42
6	Konstruksi	6,07	4,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,77	5,98
8	Transportasi dan Pergudangan	7,55	8,49

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN (%)	
		2018	2019
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,17	9,14
10	Informasi dan Komunikasi	12,39	11,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	3,51
12	Real Estate	5,58	5,53
13	Jasa Perusahaan	9,48	10,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,71
15	Jasa Pendidikan	7,76	7,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	6,72
17	Jasa lainnya	9,45	9,02
	PDRB	5,31	5,41

Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

PDRB dari sisi pengeluaran memperlihatkan bahwa beberapa komponen pengeluaran pada Tahun 2019 tumbuh menguat seperti konsumsi pemerintah dan lembaga non profit (LNPRRT). Konsumsi pemerintah tumbuh 3,98 persen pada 2019, tahun sebelumnya tumbuh 2,98 persen. Sedangkan konsumsi lembaga non profit menguat dari 7,62 persen menjadi 10,90 persen. Konsumsi rumah tangga selaku komponen yang paling dominan pada PDRB Pengeluaran tumbuh 4,62 persen pada 2019. Pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya konsumsi makan minum dan komunikasi akibat daya beli yang terjaga dan peningkatan kesejahteraan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (*fixed capital*) melemah menjadi 4,85 persen pada Tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,68 persen. Pelemahan ini dikarenakan sebagian besar pembangunan investasi dalam bentuk barang modal, utamanya investasi tol trans Jawa, bandara serta pelabuhan sudah selesai. Komponen lainnya yang mengalami pelemahan adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia hanya tumbuh 5,76 persen pada Tahun 2019 yang pada tahun sebelumnya mencapai 11,48 persen. Adapun impor dari luar negeri dan dari provinsi lain tumbuh 3,69 persen di Tahun 2019 dimana tahun sebelumnya tumbuh 12,49 persen. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2018 – 2019

NO	KOMPONEN PENGELUARAN	PERSEN (%)	
		2018	2019
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,69	4,62
2	Konsumsi LNPRT	7,62	10,90
3	Konsumsi Pemerintah	2,98	3,98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,68	4,85
5	Perubahan Inventori	4,66	-5,13
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	11,48	5,76
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	12,49	3,69
	PDRB	5,31	5,41

Sumber: BPS Jateng, 2019 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2019 dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa dapat dilihat pada tabel 1.4. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur mengalami penguatan pertumbuhan sedangkan Provinsi DKI, Jawa Barat dan Banten tumbuh melemah.

Tabel 1.4.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2019

NO	PROVINSI/NASIONAL	PERSEN (%)	
		2018	2019
1	DIY	6,20	6,60
2	DKI Jakarta	6,17	5,89
3	Jawa Timur	5,50	5,52
4	Jawa Tengah	5,31	5,41
5	Jawa Barat	5,66	5,07
6	Banten	5,82	5,53
	Nasional	5,17	5,02

Sumber: BPS Jateng, 2019 (diolah)

a.1. Sumber Pertumbuhan PDRB

Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh industri pengolahan sebesar 1,78 persen disusul dengan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,87 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 0,56 persen. Sedangkan pertanian yang termasuk lapangan usaha unggulan hanya menyumbang 0,18 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Ketiga lapangan usaha unggulan tersebut menyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2019 sebesar 3,21 persen. Tabel 1.5. memperlihatkan sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha secara lengkap.

Tabel 1.5.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2019

LAPANGAN USAHA		PERSEN (%)	
		2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,35	0,18
2	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,07
3	Industri Pengolahan	1,50	1,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00
6	Konstruksi	0,63	0,52
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,83	0,87
8	Transportasi dan Pergudangan	0,25	0,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,30
10	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,10
12	Real Estate	0,11	0,10
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,09	0,10
15	Jasa Pendidikan	0,29	0,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,06
17	Jasa lainnya	0,15	0,15
	PDRB	5,31	5,41

Sumber: BPS Jateng, 2020 (diolah)

Dari sisi PDRB Pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen konsumsi rumah tangga sebesar 2,73 persen, selanjutnya berasal dari komponen ekspor (2,44%) dan PMTB (1,47%). Jika tanpa komponen impor, potensi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bisa cukup tinggi yaitu 6,77 persen, yang merupakan sumbangan dari semua komponen pengeluaran kecuali impor. Apabila impor, baik impor dari luar negeri maupun dari provinsi lain mampu ditekan maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat terdorong lebih tinggi. Data lengkap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen
Pengeluaran Tahun 2018 – 2019

NO	KOMPONEN	PERSEN (%)	
		2018	2019
1	Konsumsi Rumah Tangga	2,79	2,73
2	Konsumsi LNPRT	0,08	0,11
3	Konsumsi Pemerintah	0,20	0,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,27	1,47
5	Perubahan Inventori	0,04	-0,05
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	4,23	2,44
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	4,30	1,36
	PDRB	5,31	5,41

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

a.2. Distribusi PDRB

Penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Tengah Tahun 2019 adalah lapangan usaha industri pengolahan 34,42 persen; disusul oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,74 persen; dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,52 persen serta konstruksi sebesar 10,67 persen. Ada pergeseran posisi penyumbang terbesar kedua, yang sebelumnya diduduki pertanian digeser oleh perdagangan. Secara keseluruhan keempat kategori tersebut di atas mempunyai kontribusi 72,35 persen dalam PDRB Jawa Tengah.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha paling banyak menyerap pekerja, kontribusinya mengalami penurunan karena menurunnya kontribusi sub lapangan usaha tanaman pangan dari 4,71 persen menjadi 4,22 persen. Ini merupakan dampak dari puso sehingga produksi padi menurun. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2018–2019 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2019

KATEGORI	STRUKTUR (%)		
		2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,06	13,52
B	Pertambangan dan Penggalan	2,55	2,48
C	Industri Pengolahan	34,41	34,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,73	10,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,64	13,74
H	Transportasi dan Pergudangan	3,12	3,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,11	3,21
J	Informasi dan Komunikasi	3,47	3,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,96	2,89
L	Real Estate	1,69	1,68
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	2,67
P	Jasa Pendidikan	4,50	4,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,59	1,63
	PDRB	100	100

Sumber: BPS Jateng, 2020 (diolah)

Peningkatan kontribusi industri pengolahan terutama karena peningkatan pada kontribusi industri non migas yaitu dari 30,61 persen menjadi 30,86 persen. Peranan industri non migas Jawa Tengah juga meningkat terhadap industri non migas secara nasional yaitu dari 14,85 persen menjadi 15,11 persen. Salah satu penyebab peningkatan ini karena bertambahnya jumlah perusahaan industri di Jawa Tengah pada tahun 2019. Kontribusi lapangan usaha unggulan di Jawa Tengah terhadap lapangan usaha yang sama pada level nasional tersaji pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8.
Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi
Jawa Tengah terhadap Nasional Tahun 2018 – 2019 (%)

Lapangan Usaha Unggulan	2018	2019
• Industri Pengolahan	14,81	15,03
• Industri Non Migas	14,85	15,11
• Pertanian	9,38	9,15
• Perdagangan	8,95	9,08
• Konstruksi	8,71	8,65

Sumber : BPS Jateng, 2020 (diolah)

Berdasarkan PDRB Pengeluaran, Tahun 2019 konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan peranan 60,33 persen, disusul oleh ekspor sebesar 42,42 persen dan PMTB sebesar 32,99 persen. Adapun impor, sebagai komponen pengurang dalam PDRB peranannya 45,38 persen. Pada tahun 2019, selisih antara peranan ekspor dan impor mengalami perbaikan dari -3,19 persen menjadi -2,96 persen yang menjadi indikasi baik bagi ekonomi Jawa Tengah karena mampu menekan impor. Data lengkap seperti pada Tabel 1.9.

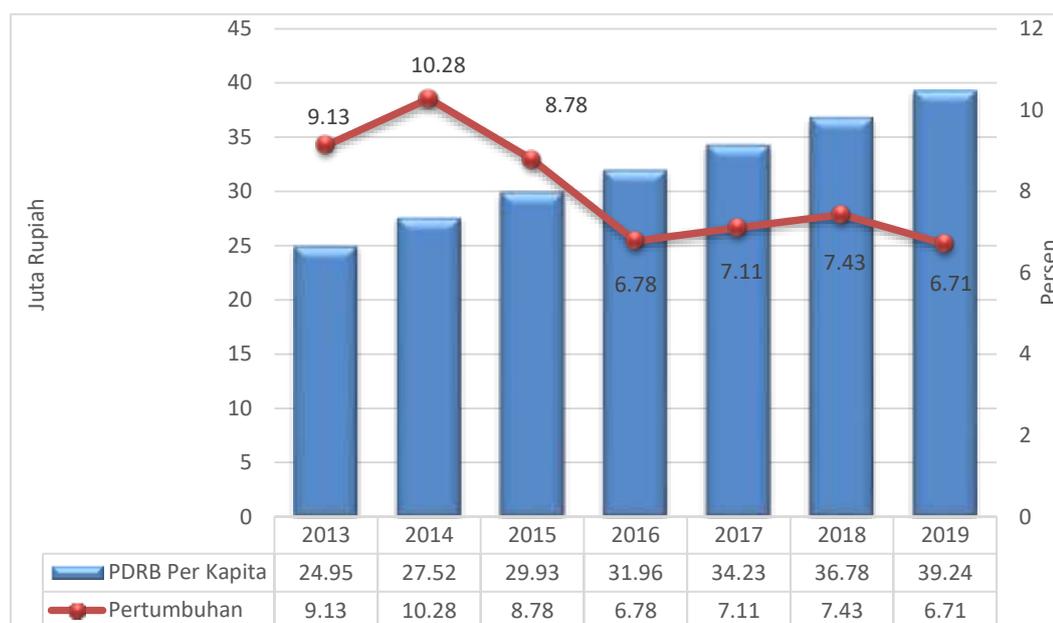
Tabel 1.9.
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2019

KOMPONEN		STRUKTUR (%)	
		2018	2019
1	Konsumsi Rumah Tangga	60,29	60,33
2	Konsumsi LNPRT	1,14	1,21
3	Konsumsi Pemerintah	7,78	7,59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,62	32,99
5	Perubahan Inventori	1,36	0,83
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	42,45	42,42
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	45,64	45,38
PDRB		100	100

Sumber : BPS Jateng, 2020 (diolah)

a.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 39,24 juta meningkat sebesar 6,71 persen dibanding PDRB per kapita Tahun 2018 sebesar Rp 36,78 juta. Pertumbuhan PDRB perkapita selalu di atas nilai inflasi yang terjadi di Jawa Tengah yang menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan. Grafik 1.2. memperlihatkan PDRB Perkapita Jawa Tengah dan Pertumbuhannya Tahun 2013 – 2019.

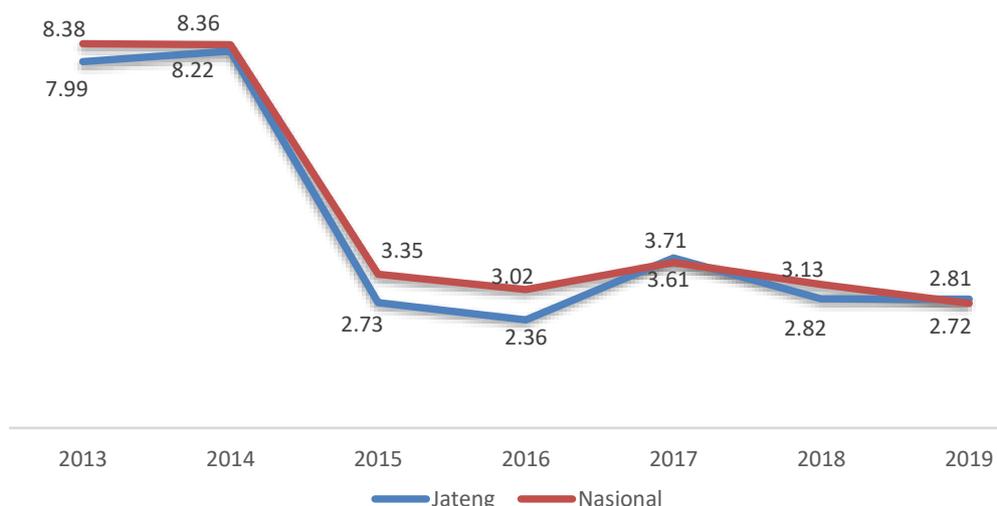


Sumber : BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.2.
PDRB Perkapita Jateng (Rp Juta) dan Pertumbuhannya (%)
Tahun 2013 – 2019

b. Inflasi

Tingkat inflasi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah 2,81 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2018 sebesar 2,82 persen. Sejak tahun 2015 hingga 2019, inflasi Jawa Tengah terus mengalami penurunan yang cukup besar. Selama tahun-tahun tersebut, inflasi Jawa Tengah sangat rendah yaitu berkisar 2,3 persen hingga 3,7 persen (Grafik 1.3).



Sumber : Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.3.
Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013 – 2019 (%)

Tren penurunan inflasi Jawa Tengah selama 2014-2019 hampir sama dengan tren penurunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dan penurunan inflasi di Jawa Tengah mempengaruhi perilaku dan kinerja inflasi nasional. Tren penurunan inflasi sejak tahun 2015-2019 berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta penguatan kualitas perekonomian Jawa Tengah secara umum. Di pulau Jawa, inflasi Jawa Tengah tahun 2019 menempati terendah ketiga setelah Jawa Timur dan DIY (Tabel 1.10).

Tabel 1.10.
Perkembangan Inflasi Tahun 2017 – 2019

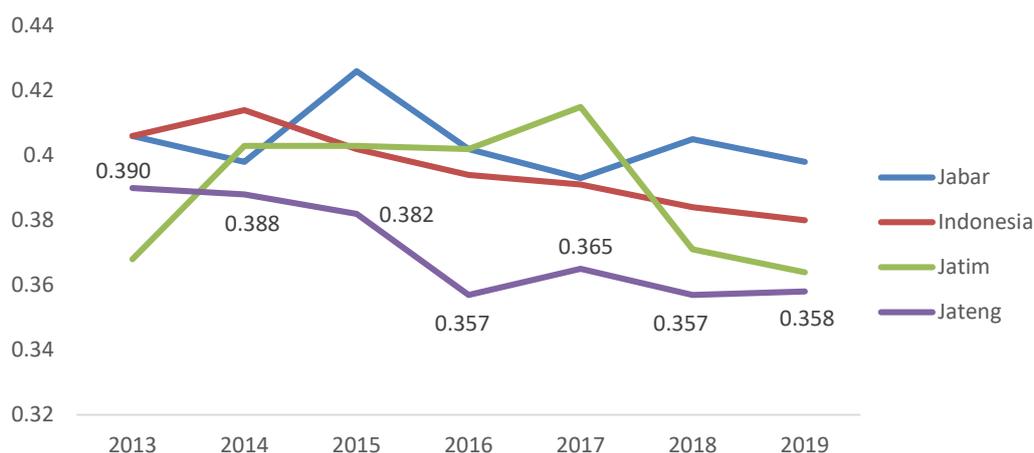
NO	PROVINSI/NASIONAL	Inflasi (%)		
		2017	2018	2019
1	Jawa Timur	4,04	2,86	2,12
2	DIY	4,20	2,66	2,77
3	Jawa Tengah	3,71	2,82	2,81
4	Jawa Barat	3,63	3,54	3,21
5	Banten	3,98	3,42	3,30
6	DKI Jakarta	3,72	3,27	3,23
	Nasional	3,61	3,13	2,72

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

c. Gini Rasio

Rasio Gini merupakan indikator statistik yang mengukur dampak hasil pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah dan rendah. Pada September 2019, Rasio Gini Jawa Tengah adalah 0,358 atau sedikit meningkat 0,001 poin dibanding September 2018 sebesar 0,357. Meski pada tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan, namun jika ditarik secara linear dari tahun 2013 hingga tahun 2019 telah menjadi perbaikan ketimpangan pendapatan sampai dengan 0,032 poin.

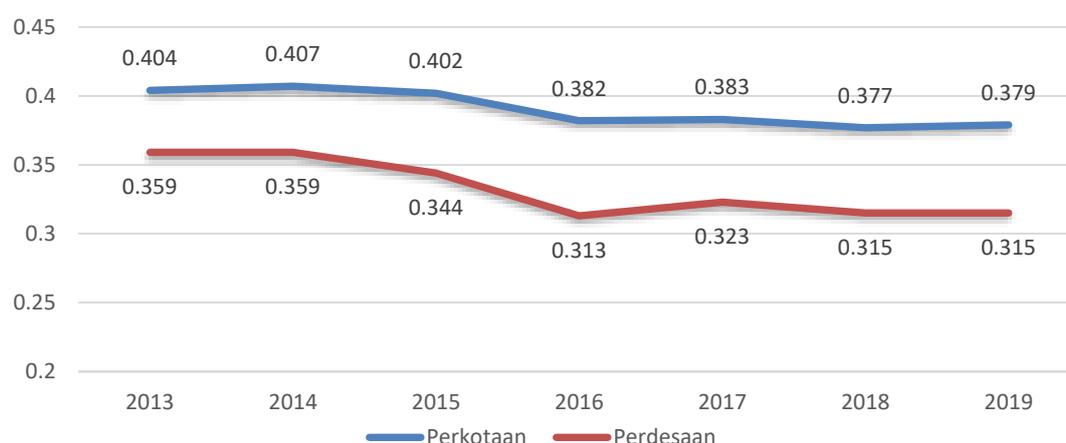
Seperti disajikan dalam Grafik 1.4. di bawah ini, bila dibandingkan dengan rasio Gini nasional dan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur maka laju penurunan Rasio Gini Jawa Tengah jauh lebih baik. Bahkan, sejak tahun 2014-2019 besaran Rasio Gini Jawa Tengah adalah yang lebih rendah dibanding nasional, Jawa Barat dan Jawa Timur, serta juga DKI Jakarta, DIY dan Banten. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan atau berpengeluaran tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan atau berpengeluaran menengah dan rendah di Jawa Tengah semakin menurun atau menyempit dan penurunannya adalah yang terbaik di pulau Jawa dalam enam tahun terakhir.



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.4.
Perkembangan Gini Rasio Jateng, Jabar, Jatim dan Indonesia
Tahun 2013 – 2019

Bila diperbandingkan antara ketimpangan perkotaan dengan perdesaan, Rasio Gini perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan rasio Gini wilayah perdesaan. Pada September 2019, Indeks Gini perdesaan adalah 0,315 sedangkan rasio Gini perkotaan adalah 0,379. Perbedaan tersebut menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan lebih serius dibanding di pedesaan. Meskipun demikian, tren ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, sejak tahun 2014-2019 cenderung menurun, baik penduduk yang di perdesaan maupun perkotaan (lihat Grafik 1.5). Penurunan rasio Gini di wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan daerah tidak hanya berdampak positif menurunkan kemiskinan tapi juga kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.



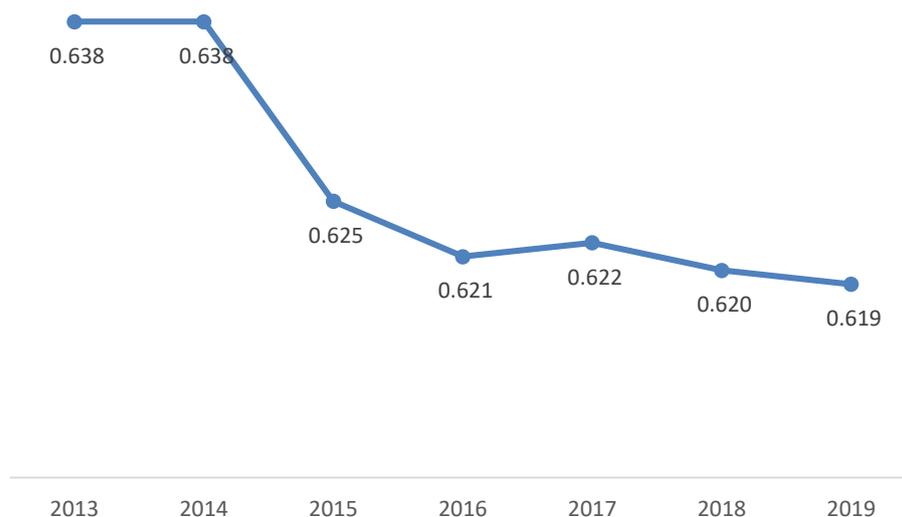
Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.5.
Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2013 – 2019

Guna menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah beberapa upaya dilakukan, seperti: meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha di masyarakat, pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja, mempermudah layanan izin usaha melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

d. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Grafik 1.6. menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah atau antar kabupaten/kota dengan provinsi di Jawa Tengah masih tinggi. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah di Jawa Tengah, yang diukur dengan Indeks Williamson, selama tahun 2013-2019 terus menurun dari tahun ke tahun, yaitu dari 0,638 pada tahun 2013 menjadi 0,619 pada tahun 2019.



Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Grafik 1.6. Perkembangan Indeks Wiliamson Jawa Tengah Tahun 2013 - 2019

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memfokuskan pembangunan pada infrastruktur, UMKM dan lainnya pada 2013-2019, selain telah meningkatkan nilai ekonomi PDRB kabupaten/kota dan provinsi, juga telah efektif berdampak positif secara berkelanjutan menurunkan ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2013-2019. Pemberian dana desa dari pemerintah pusat maupun intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pusat pada kabupaten dan kota juga telah turut berkontribusi menurunkan ketimpangan antarwilayah dalam enam tahun terakhir. Namun,

mengingat tingkat ketimpangan antarwilayah masih tinggi maka pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan daerah, alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pembangunan kawasan perbatasan, dan menciptakan iklim usaha kondusif harus terus dilanjutkan dengan kapasitas dan intensitas yang semakin besar.

e. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 106 lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 103,64.

Tabel 1.11. menunjukkan bahwa NTP secara bulanan selama bulan Januari - Desember 2019 selalu lebih besar dibanding NTP Januari - Desember 2018. Perincian terkait perbandingan NTP secara bulanan tahun 2019 dibanding 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11.
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2019

Bulan	2018	2019
Januari	103,00	103,77
Februari	101,55	102,67
Maret	101,29	102,83
April	101,16	102,17
Mei	101,19	103,57
Juni	101,36	103,15
Juli	101,29	103,75
Agustus	102,50	104,95
September	103,31	105,98
Oktober	103,19	106,30
Nopember	103,44	105,99
Desember	103,64	106,00

Sumber : Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Jika dibandingkan dengan nasional Desember 2019 sebesar 104,46, NTP Jawa Tengah pada bulan Desember 2019 lebih tinggi 1,54 poin. Dan apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, NTP Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan NTP DKI Jakarta dan Banten. Data selengkapnya sebagaimana Tabel 1.12.

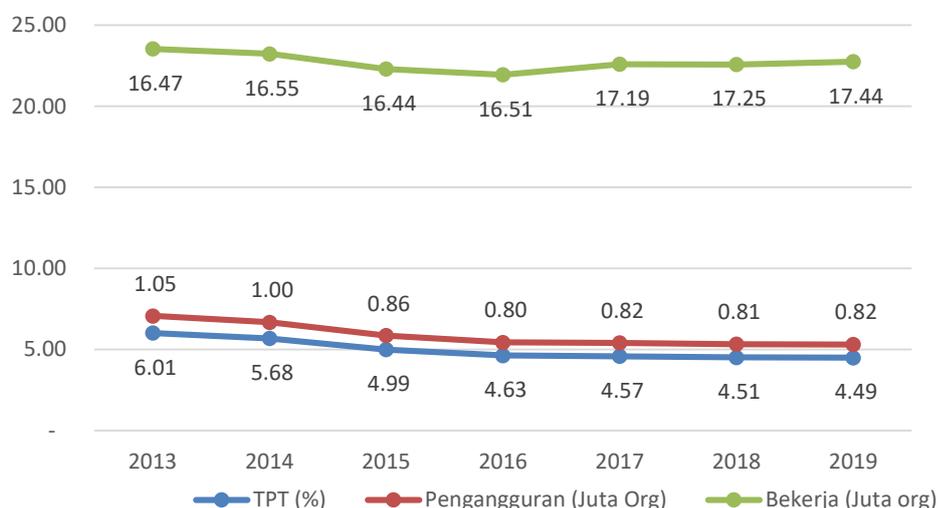
Tabel 1.12.
Nilai Tukar Petani Tahun 2018 – 2019

NO	PROVINSI/NASIONAL	NTP	
		DES 2018	DES 2019
1	Jawa Barat	100,52	112,36
2	Jawa Timur	108,61	109,49
3	DIY	101,26	107,08
4	Jawa Tengah	103,64	106,00
5	Banten	110,90	103,10
6	DKI Jakarta	100,44	96,37
	Nasional	103,16	104,46

Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

f. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Agustus 2019, jumlah Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah adalah 820.000 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,49 persen, menurun sebanyak 50.000 orang atau sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan Agustus 2018 yang berjumlah 810.000 orang atau sebesar 4,51 persen. Secara keseluruhan, jumlah pengangguran terbuka dan TPT Jawa Tengah sejak tahun 2014 hingga 2019 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara jumlah yang bekerja terus mengalami peningkatan. Tren penurunan jumlah pengangguran terbuka dan TPT sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.7.
Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa Tengah Tahun 2013 – 2019

Penurunan jumlah pengangguran terbuka dan TPT tersebut terjadi karena Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk mengurangi pengangguran antara lain: memberi kemudahan dalam proses perizinan usaha untuk mendorong investasi, revitalisasi BLK untuk peningkatan kapasitas keterampilan tenaga kerja, dan mendorong pihak swasta melalui CSR untuk berperan mempersiapkan generasi muda yang produktif dan berdaya saing.

Sebagai perbandingan, Tabel 1.13. berikut ini menyajikan TPT Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi se-Jawa periode Agustus 2018 dan Agustus 2019.

Tabel 1.13.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se-Jawa
Periode Agustus 2018 – 2019

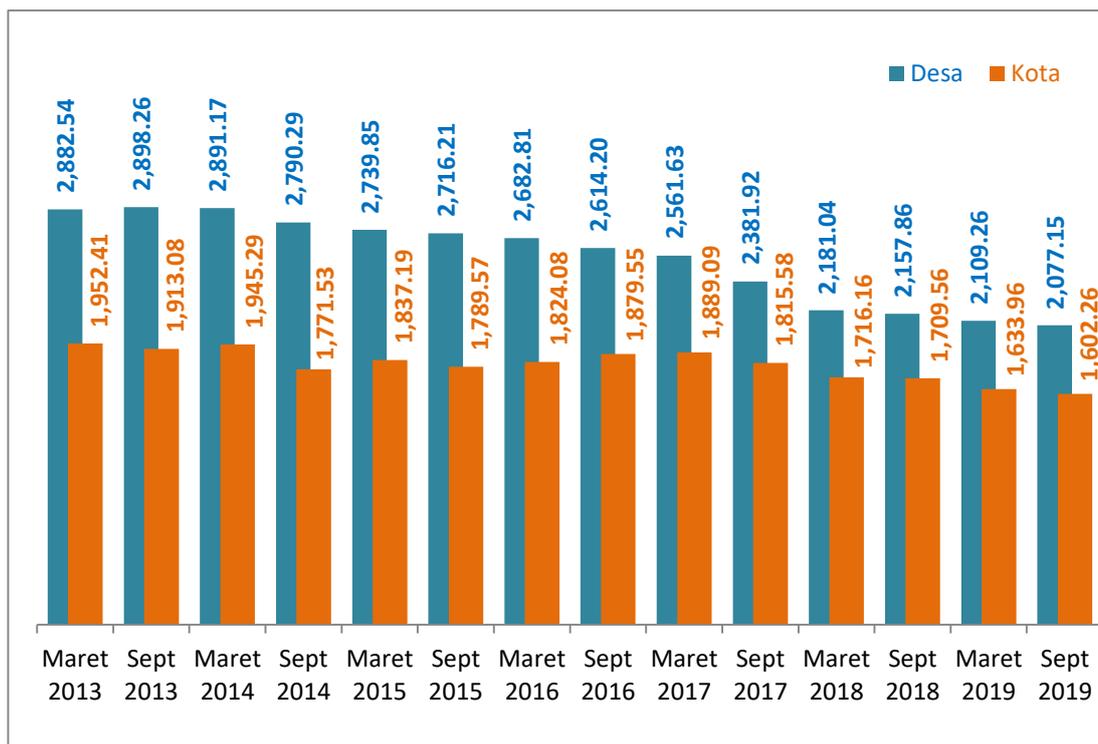
NO	PROVINSI/NASIONAL	2018	2019
1	DI Yogyakarta	3,35	3,14
2	Jawa Timur	3,99	3,92
3	Jawa Tengah	4,51	4,49
4	DKI Jakarta	6,24	6,22
5	Jawa Barat	8,17	7,99
6	Banten	8,52	8,11
	Nasional	5,34	5,28

Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

g. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, penduduk miskin diartikan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Jawa tengah adalah 3,679 juta orang (10,58%) atau turun sebanyak 188 ribu orang dari tahun 2018 yang berjumlah 3,867 juta orang (11,19%).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah terus menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 hingga 2019. Seperti terlihat pada Grafik 1.8, tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan semakin besar terjadi mulai tahun 2017-2019. Pada tahun 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 297 ribu orang, tahun 2018 sebanyak 330 ribu orang dan tahun 2019 sebanyak 188 ribu orang. Penurunan yang kian besar dan menjadi yang terbanyak di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan di Jawa Tengah semakin besar memberikan dampak positif kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.



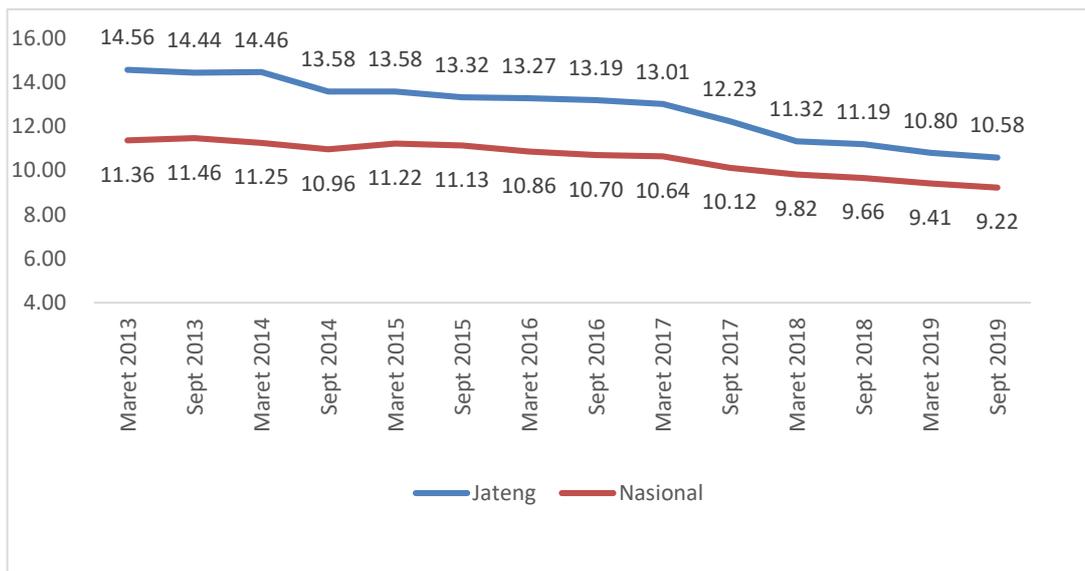
Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.8.

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2013-2019 (Ribuan Orang)

Bila dibandingkan penurunan jumlah penduduk miskin di kota dan desa, pola tren penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan hampir sama. Meski dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit dibanding perdesaan, namun tren penurunannya hampir sama. Grafik 1.8. memperlihatkan pola penurunan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan daerah di Jawa Tengah dirasakan manfaatnya tidak hanya masyarakat perdesaan tapi juga masyarakat perkotaan.

Apabila dibanding dengan kemiskinan nasional, harus diakui persentase kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi. Pada tahun 2019, persentase kemiskinan Jawa Tengah adalah 10,58 persen sementara persentase kemiskinan nasional adalah 9,22 persen. Namun demikian, tren penurunan persentase kemiskinan Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih besar dibanding nasional. Terlihat dari gap persentase kemiskinan yang terus mengecil antara Jateng dan Nasional seperti terlihat pada grafik 1.9.

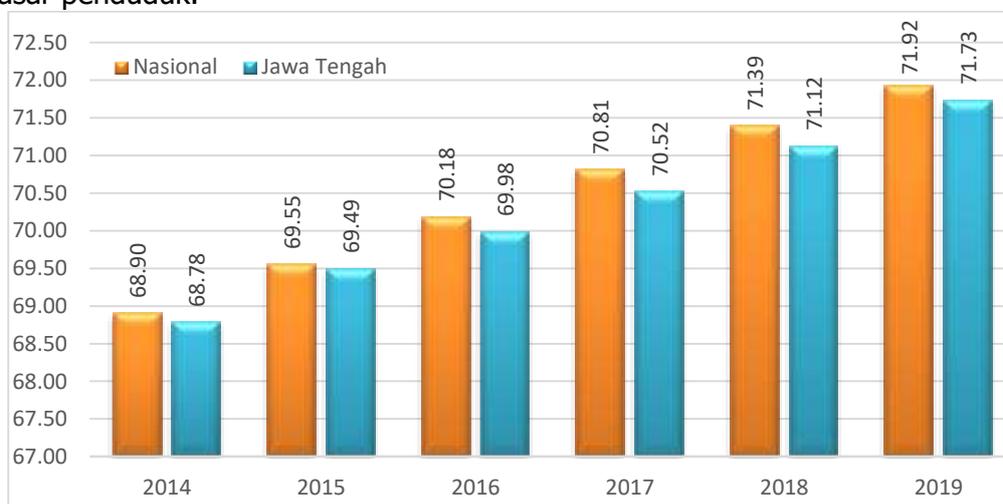


Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Grafik 1.9.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jateng dan Nasional Tahun 2013-2019 (%)

h. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.



Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Grafik 1.10.
Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2019

Pada tahun 2019, IPM Jawa Tengah adalah 71,73 atau mengalami kenaikan sebesar 0,61 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,12. Sejak tahun 2017, Jawa Tengah telah masuk dalam kategori provinsi dengan IPM Tinggi. Secara umum, seperti terlihat pada Grafik 1.10, sejak tahun 2014-2019 IPM Jawa Tengah

terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2018–2019 dibandingkan dengan provinsi tetangga dan nasional dapat dilihat pada Tabel 1.14. Pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,86% merupakan tertinggi ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki pertumbuhan sebesar 1,03% dan 1,02%. Pertumbuhan terendah dimiliki Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.14.
Perkembangan IPM Tahun 2018 – 2019

NO	PROVINSI/NASIONAL	CAPAIAN IPM		PERSENTASE PERTUMBUHAN IPM
		2018	2019	
1	Jawa Barat	71,30	72,03	1,02
2	Jawa Tengah	71,12	71,73	0,86
3	DI Yogyakarta	79,53	79,99	0,58
4	Banten	71,95	72,44	0,68
5	Jawa Timur	70,77	71,50	1,03
6	DKI Jakarta	80,47	80,76	0,36
	Nasional	71,39	71,92	0,74

Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Pada tingkat kabupaten/kota, capaian IPM tertinggi pada tahun 2019 diraih oleh Kota Semarang sebesar 83,19. Sedangkan capaian IPM terkecil diperoleh Kabupaten Brebes sebesar 66,12 dan Kabupaten Pemalang sebesar 66,32. Sementara dari sisi persentase pertumbuhannya, pada level kabupaten, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 dibukukan oleh Kabupaten Tegal sebesar 1,35 persen sementara pertumbuhan terendah dibukukan oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 0,46 persen. Pada level kota, pertumbuhan tertinggi dibukukan Kota Salatiga, sementara terendah dibukukan oleh Kota Surakarta.

Data lengkap IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2018–2019 dapat dilihat pada Tabel 1.15 sebagai berikut.

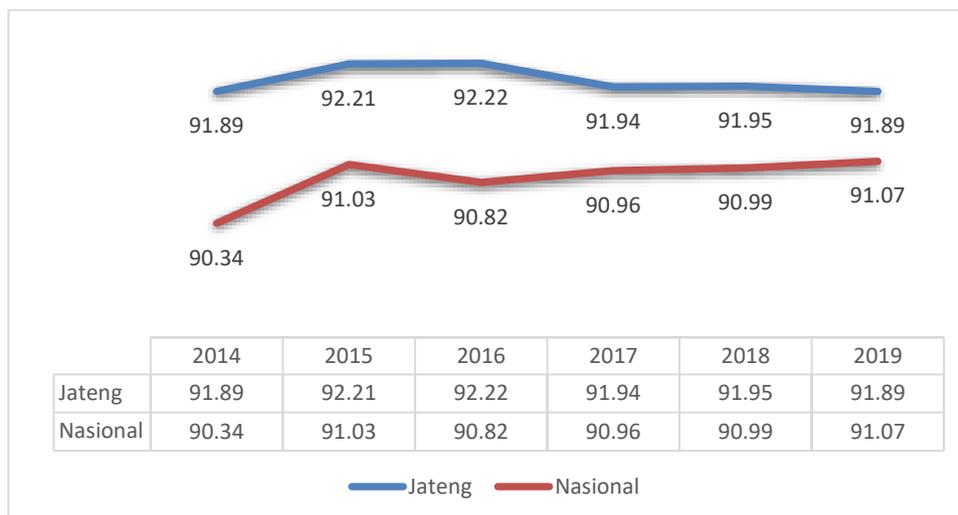
Tabel 1.15.
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2018–2019

NO.	KAB/KOTA	IPM		GROWTH (%)
		2018	2019	
1	Cilacap	69,56	69,98	0,60
2	Banyumas	71,30	71,96	0,93
3	Purbalingga	68,41	68,99	0,85
4	Banjarnegara	66,54	67,34	1,20
5	Kebumen	68,80	69,60	1,16
6	Purworejo	71,87	72,50	0,88
7	Wonosobo	67,81	68,27	0,68
8	Magelang	69,11	69,87	1,10
9	Boyolali	73,22	73,80	0,79
10	Klaten	74,79	75,29	0,67
11	Sukoharjo	76,07	76,84	1,01
12	Wonogiri	69,37	69,98	0,88
13	Karanganyar	75,54	75,89	0,46
14	Sragen	72,96	73,43	0,64
15	Grobogan	69,32	69,86	0,78
16	Blora	67,95	68,65	1,03
17	Rembang	69,46	70,15	0,99
18	Pati	70,71	71,35	0,91
19	Kudus	74,58	74,94	0,48
20	Jepara	71,38	71,88	0,70
21	Demak	71,26	71,87	0,86
22	Semarang	73,61	74,14	0,72
23	Temanggung	68,83	69,56	1,06
24	Kendal	71,28	71,97	0,97
25	Batang	67,86	68,42	0,83
26	Pekalongan	68,97	69,71	1,07
27	Pemalang	65,67	66,32	0,99
28	Tegal	67,33	68,24	1,35
29	Brebes	65,68	66,12	0,67
30	Kota Magelang	78,31	78,80	0,63
31	Kota Surakarta	81,46	81,86	0,49
32	Kota Salatiga	82,41	83,12	0,86
33	Kota Semarang	82,72	83,19	0,57
34	Kota Pekalongan	74,24	74,77	0,71
35	Kota Tegal	74,44	74,93	0,66
36	Jawa Tengah	71,12	71,73	0,86

Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

i. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 91,89 di atas capaian nasional yang berada pada nilai 91,07 sekalipun nilai IPG Jawa Tengah tahun 2019 sedikit turun dari tahun 2018.

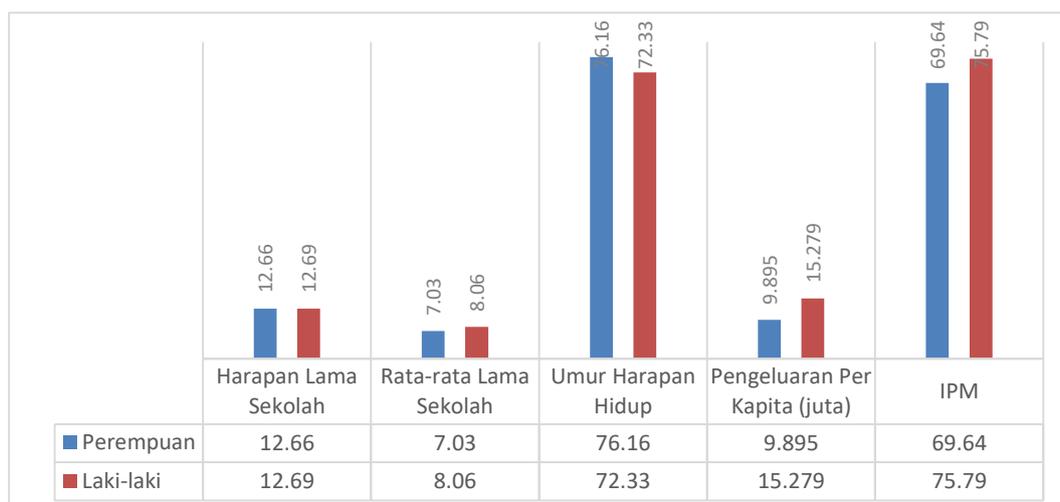


Sumber: Data BPS Jateng, 2019 (diolah)

Grafik 1.11.

Perbandingan IPG Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2014 – 2019

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2019, hal yang perlu menjadi perhatian adalah pengarusutamaan gender pada sektor pendidikan khususnya usia sekolah dan sektor ekonomi dengan fokus pada peningkatan kompetensi perempuan serta membuka akses seluas luasnya bagi kaum perempuan di dunia kerja dan usaha ekonomi produktif. Gambaran nilai pembentuk IPG Jawa Tengah tahun 2019 sebagaimana grafik berikut:



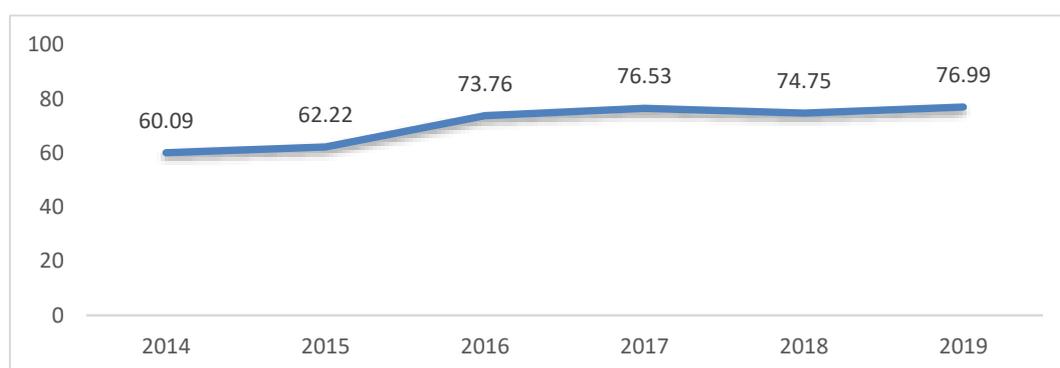
Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik 1.12.

Komponen Pembentuk IPG Jawa Tengah Tahun 2019

j. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan efektifitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. IRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 76,99 naik dari tahun 2018 (74,75). Nilai IRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 meningkat signifikan dibandingkan dengan capaian IRB tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan kinerja birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin baik. Berikut capaian IRB Jawa Tengah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 seperti pada grafik berikut:



Sumber: Data Kemenpan RB RI, 2019 (diolah)

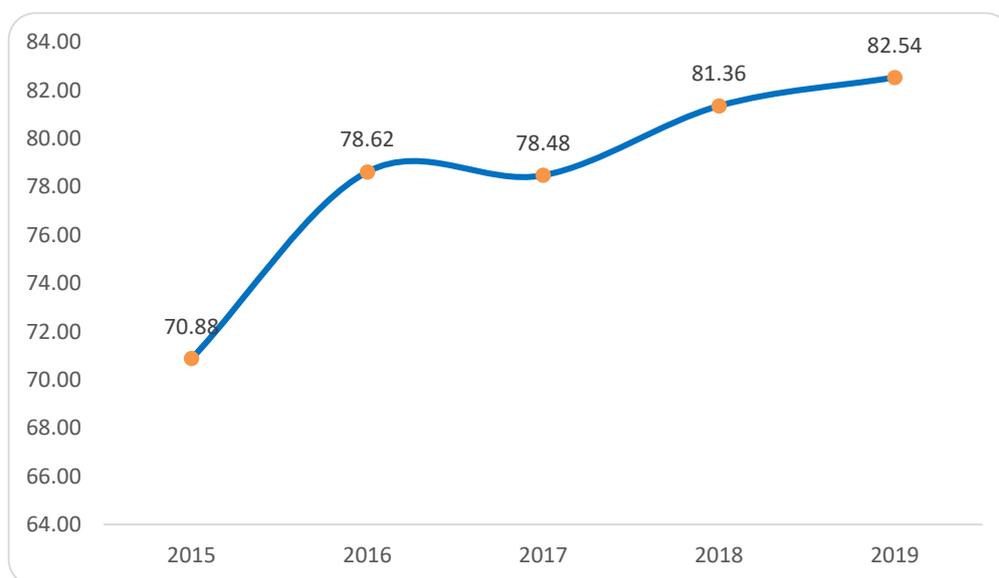
Grafik 1.13.
Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan visi “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan komitmen pimpinan dalam pencegahan dan pemberantasan KKN melalui *tagline* Gubernur “Tetep mboten Korupsi mBoten Ngapusi”;
2. Penguatan sistem Pengawasan melalui Penerapan SPIP, LHKPN, LHKASN, Pengendalian Gratifikasi, Pembangunan Zona Integritas;
3. Peningkatan partisipasi publik melalui pelibatan dalam proses perencanaan Pembangunan dan Pengawasan melalui penyediaan kanal-kanal pengaduan;
4. Penerapan digitalisasi dalam sistem Pemerintahan melalui GRMS;
5. Efisiensi penggunaan anggaran melalui standarisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan;
6. Penerapan pelayanan mudah, cepat, murah, nyaman, jelas dan terjangkau oleh masyarakat berbasis IT;
7. Melakukan harmonisasi dan pengendalian produk hukum;
8. Penataan kelembagaan secara *rightsizing* berdasarkan visi misi Gubernur;
9. Penerapkan sistem rekrutmen PNS berbasis *Computer Assisted Test* (CAT), *talent scouting* dan *open bidding* untuk Pejabat Struktural serta mengembangkan *Assesment Centre* untuk pengembangan karier pegawai;
10. Penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui pengintegrasian dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja.

k. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan masyarakat adalah hasil kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.



Sumber: Data Laporan IKM Pemprov Jateng, 2015-2019 (diolah)

Grafik 1.14.
Progres IKM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2019

Rata-rata IKM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah 82,54 atau mengalami kenaikan sebesar 1,18 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 81,36. Secara umum sejak tahun 2015-2019, IKM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat.

l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengindikasikan kondisi lingkungan hidup di Jawa Tengah yang dicerminkan dengan kondisi kualitas air, udara, dan lahan/hutan. Nilai IKLH Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 66,88 meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Dari nilai IKLH tersebut menunjukkan kualitas lingkungan hidup Jawa Tengah semakin baik. Berikut nilai IKLH Jawa Tengah pada Tahun 2014-2019 sebagaimana Grafik 1.16



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2020 (diolah)

Grafik 1.15.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2019